

# MERDEKA DALAM KEMAJEMUKAN

*Oleh Ignas Kleden*

Gerakan kebangsaan untuk Indonesia Merdeka yang kemudian diteruskan dengan perjuangan bersenjata mengandung satu tema yang sama yaitu pembebasan atau kemerdekaan-dari (*freedom from*). Ada kepercayaan bahwa kemerdekaan belum terwujud pada waktu itu karena ada yang menghalanginya, yaitu pihak penjajah. Penduduk di Hindia Belanda memang hidup dalam suatu negara tetapi negara tersebut bukanlah penjelmaan kehendak politik mereka sendiri, tetapi perwujudan kehendak dan kekuatan asing dalam bentuk negara kolonial. Sekali pun belum jelas betul pada masa itu, negara kolonial tersebut dianggap menghalangi kemerdekaan bukan terutama karena dikendalikan oleh kekuatan asing, tetapi karena kekuatan asing tersebut tidak memperlakukan kemerdekaan dan kesejahteraan penduduk setempat sebagai tujuan dari politik negara kolonial. Penolakan terhadap negara kolonial tidak disebabkan karena “keasingannya”, tetapi oleh kenyataan bahwa hadirnya kekuatan asing itu menghalangi terwujudnya kemerdekaan dan kesejahteraan penduduk koloni.

Beberapa teoretisi mengatakan bahwa bangsa pada mulanya bukanlah suatu pengertian politis. Karena bangsa dapat terbentuk berdasarkan kesamaan nasib sebagaimana dikatakan oleh Otto Bauer, atau kesamaan imajinasi sebagaimana dikatakan oleh Ben Anderson misalnya. Orang dapat hidup sebagai bangsa karena kesamaan bahasa, daerah, asal-usul atau kesamaan mitos yang mereka hayati bersama. Munculnya nasionalisme mengubah bangsa (*nation*) sebagai satuan yang pra-politis menjadi suatu unit politik. Dalam nasionalisme dihidupkan kesadaran sekelompok orang untuk menentukan nasibnya sendiri berdasarkan kehendak politik yang sadar. Untuk memakai model Yunani Antik, maka dapat dikatakan bahwa bangsa yang tadinya masih merupakan suatu *oikos* semata, yaitu suatu rumah tangga yang menempati ruang privat, oleh nasionalisme diubah menjadi *polis*, yaitu suatu ruang publik, dan bahkan ruang politik.

Bangsa dalam pengertian politik inilah yang kemudian digalakkan sosialisasinya oleh para pemikir dan pejuang kemerdekaan kita. Bung Karno dengan amat mahir menjadikan nasionalisme sebagai sarana untuk *nation-building*. Segala sesuatu yang sebelum ini lebih mirip *oikos* di Athena dulu, harus diubah menjadi *polis* atau *polity* menurut istilah ilmu politik sekarang. Persyaratan untuk itu sebagaimana berulang kali diucapkan dan dituliskan oleh Bung Karno ialah kehendak revolusioner untuk mengakhiri penjajahan, dan akumulasi kehendak dan kekuatan revolusioner tersebut melalui persatuan nasional. Segala perbedaan menyangkut kebudayaan, etnisitas, kesukuan, agama dan daerah, menjadi sekunder, dan nampaknya harus dikorbankan untuk apa yang dinamakannya *samenbundeling van alle revolutionaire krachten* yaitu penyatu-paduan semua kekuatan dan tenaga revolusioner.

Dalam retorika seperti itu, kemerdekaan, bangsa, nasionalisme dan persatuan seakan-akan menjadi sinonim dalam maknanya. Siapa yang berpikir tentang bangsa akan berjuang untuk kemerdekaan, dan mempertahankan persatuan nasional. Sekali pun demikian, kemerdekaan yang diperjuangkan itu adalah kemerdekaan-dari, suatu *freedom from*, yang dalam kata-kata Bung Karno hanya menjadi suatu jembatan, sekali pun jembatan emas. Setelah tercapai pembebasan pada tahapan ini, dan setelah menyeberangi jembatan tersebut, bangsa Indonesia tidak lagi berurusan dengan kemerdekaan-dari, tetapi menghadapi masalah kemerdekaan-untuk (*freedom for*), yang harus diberi isi dan makna baru.

Nampaknya semangat untuk kemerdekaan-dari tersebut, diteruskan juga dalam masa Orde Baru, dengan tekanan yang bergeser dan semantik yang berubah. Pembangunan dianggap sebagai usaha nasional membebaskan rakyat Indonesia dari kemiskinan dan keterbelakangan, entah keterbelakangan itu dilihat sebagai warisan kolonial, atau sebagai kondisi suatu bangsa yang baru bergelut dengan usaha menentukan nasibnya sendiri. Akan tetapi bersamaan dengan itu terjadi peralihan dalam *parole* politik Indonesia : bangsa bergeser menjadi negara-bangsa (*nation-state*) dan kemudian berfokus pada negara saja. Kemerdekaan diganti oleh pembangunan, sedangkan persatuan diganti oleh stabilitas dan penyeragaman. Regimentasi politik, etatisme dalam ekonomi, dirigisme dalam kebudayaan, dan pragmatisme pendidikan berjalan bagaikan iringan domba-domba di bawah tongkat seorang gembala yang menjadi kepala negara dan kepala

pemerintahan. Caranya negara mengontrol modal tak banyak berbeda dari cara seorang guru mengawasi murid di kelas, atau cara seorang pejabat mengontrol pelaksanaan program KB.

Reformasi 1998 yang mengakhiri Orde Baru, secara kebetulan atau tidak mengakhiri juga retorika persatuan dan semua turunan semantiknya dalam politik Indonesia. Tiba-tiba orang menjadi sadar bahwa pembebasan atau kemerdekaan-dari dapat menjadi dalih untuk kekerasan politik kalau tidak dites dengan jenis kebebasan lainnya yaitu kemerdekaan-untuk (*freedom for*) berupa realisasi bakat dan kemampuan setiap warga.. Kalau kemerdekaan-dari mengharuskan persatuan maka kemerdekaan-untuk menuntut lebih banyak ruang untuk kemajemukan, karena kemerdekaan pertamanya diuji oleh adanya kemerdekaan untuk berbeda. Seorang baru dapat menyebut dirinya bebas kalau dia boleh dan sanggup menyatakan dirinya secara berbeda dari orang lain atau bahkan dari kelompok tempat dia diperanggotakan.

Kalau dalam retorika lama terdengar semboyan berbeda-beda tetapi satu, maka dengan adanya tuntutan akan kemajemukan, terjadi pembalikan besar dalam semboyan tersebut: satu tetapi berbeda-beda. Kesadaran tentang pluralisme budaya memang sudah ada dalam kesadaran kolektif di Nusantara ini sejak lama. Ada demikian banyak kelompok budaya, kelompok etnik dan suku serta kelompok agama. Namun demikian dalam tahapan ini keaneka-ragaman budaya itu dipandang tak berbeda dari keaneka-ragaman hayati dengan dua asumsi utama. Pertama, perbedaan budaya dianggap terdapat antara satu kelompok budaya dan kelompok budaya lain. Kedua, perbedaan-perbedaan itu sudah ada begitu saja secara “alamiah” dan sepatutnya diterima dan dihormati. Toleransi adalah kebajikan dalam berhadapan dengan perbedaan antar-budaya (*inter-cultural differences*). Kebudayaan dibentuk oleh identitas sedangkan perbedaan dipahami sebagai variasi antara satu identitas dan identitas budaya lainnya.

Munculnya paham multikulturalisme memberikan aksentuasi baru dan sedikit koreksi terhadap pluralisme budaya. Pada tempat pertama kebudayaan itu tidak lagi dianggap hadir secara alamiah tetapi merupakan hasil bentukan oleh pendukung kebudayaan itu. Kebudayaan itu dibuat oleh manusia sendiri dan bukannya dari “sononya” sudah begitu. Dalam antropologi budaya dikatakan bahwa orang Bugis dibentuk oleh kebudayaan Bugis, tetapi dalam paham *cultural studies* ditekankan kenyataan sebaliknya bahwa orang

Bugis sendirilah yang membentuk kebudayaan mereka. Kepercayaan-kepercayaan dalam kebudayaan dibuat oleh manusia seperti halnya dia membangun rumah atau membuat perahu, dan nilai-nilai budaya juga dibuat oleh manusia sendiri seperti halnya dia membuat hiasan baju, cincin dan anting-anting. Karena itu perbedaan budaya juga bukanlah sesuatu yang alamiah tetapi hasil konstruksi oleh pendukung kebudayaan. Konstruksi ini jelas memerlukan kemampuan kreatif yang luas dan terus-menerus, dengan akibat bahwa dalam satu kebudayaan yang sama dapat tercipta berbagai variasi. Perbedaan budaya tidak hanya terdapat antara satu kebudayaan dan kebudayaan lainnya berupa *inter-cultural differences*, tetapi perbedaan-perbedaan itu dapat muncul dalam satu kebudayaan yang sama dan menjadi *intra-cultural differences*. Ada Jawa Solo tetapi juga ada Jawa Pekalongan. Ada Batak Karo dan ada Batak Toba.

Sikap terhadap kebudayaan tidak lagi ditandai oleh toleransi saja (yang dianggap tidak mencukupi lagi) tetapi juga oleh *affirmative action* dalam membela nilai-nilai kebudayaan yang dianggap lebih adil. Kaum feminis misalnya akan mengatakan bahwa kebudayaan dengan kecenderungan patriarkis yang kuat harus dikoreksi dan ditolak dan orang sebaiknya memihak kepada kebudayaan yang memberikan kesempatan yang lebih besar bagi kemajuan dan persamaan hak perempuan. Kalau dalam pluralisme kebudayaan diidentifikasi berdasarkan kerangka geografis, maka dalam multikulturalisme kebudayaan diidentifikasi berdasarkan kerangka politisnya. Kebudayaan tidak hanya dibentuk oleh identitas tetapi oleh perbedaan-perbedaan..

Pada titik ini kelihatan bahwa untuk kepentingan sekarang nasionalisme dengan tujuan pembebasan atau kemerdekaan-dari tidak mencukupi lagi, dan harus diperlengkapi dengan demokrasi yang lebih menjamin kemerdekaan-untuk bagi perkembangan setiap warga. Multikulturalisme dan kemajemukan adalah sinonim kebudayaan untuk demokrasi politik. Setiap pandangan yang melihat perbedaan sebagai ancaman dan potensi konflik, sebenarnya masih terjebak dalam konsepsi budaya yang hanya mementingkan identitas, politik yang hanya mementingkan persatuan, dan pendidikan yang hanya berkuat dengan kemerdekaan-dari tetapi gagal mengejawantahkan kemerdekaan-untuk yang merupakan daerah impian yang ada di seberang jembatan emas. Kemerdekaan-dari harus dipertahankan dengan kekuatan persatuan, tetapi kemerdekaan-

untuk dapat diciptakan dengan kreativitas yang tinggi yang lahir dari kemungkinan untuk berbeda, dan menciptakan perbedaan-perbedaan sebagai produknya.

Kalau anak-anak kelas tiga di sebuah SD dapat mengirim kartu pos kepada teman-temannya maka kita berbesar hati bahwa mereka sudah terbebas dari buta-huruf. Namun kalau semua kartu pos itu berisi kalimat yang kurang-lebih sama isi dan bentuknya maka kartu-kartu pos itu menjadi amat membosankan. Anak-anak itu ternyata belum merdeka untuk berbeda, suatu hal yang akan membuat kartu-kartu pos itu barangkali layak disimpan dan dikenang, dan membuat kemerdekaan bukan saja sesuatu yang diperjuangkan tetapi sesuatu yang indah untuk dinikmati.

*Ignas Kleden, sosiolog, Ketua Komunitas Indonesia untuk Demokrasi (KID), Jakarta*